



(LKPj)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2022



KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tamuan, 2023

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LKPI

Kabupaten Pesisir Selatan



Kecamatan Airpura
TA. 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Kecamatan Airpura ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang dibuat oleh Kantor Camat Kecamatan Airpura sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh oleh Kantor Camat Kecamatan Airpura selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Kantor Camat Airpura menjadi dokumen laporan hasil kerja mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan yang kami laksanakan.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tamuan, 19 Januari 2023
CAMAT AIRPURA,

SITI AYENTI, S.Sos
NIP. 19610231989032001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Indicator Kinerja Utama Perangkat Daerah	6
2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
2.3 Kebijakan Strategis	28
2.4 Penghargaan	29

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Masalah dan Solusi	30
------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPj Bupati Pesisir Selatan ATA 2022 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. LKPj Bupati Pesisir Selatan ATA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Pelaksanaan kefgiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Camat Kecamatan Airpura dalam pelaksanaan tugas yang diemban dalam tahun 2022, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi kami dalam menetapkan tujuan dan merumuskan kebijakan dimasa yang akan datang.

BAB II**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN****KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA****2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Airpura**

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kantor Camat Airpura sebagai salah satu perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemda Pesisir Selatan berkewajiban untuk membuat Capaian Indikator Kinerja Utama yang dapat dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.1**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III)****Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik, internet air dan listrik, Tersedianya jasa administrasi keuangan,		Bulan	12	98.11%	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Bulan	12	96.65%	

<p>Tersedianya kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja, Tersedianya ATK, prangko, materai dan benda pos lainnya, Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor Penggandaan, Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan kantor /penerangan kantor, Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan, Terpenuhiya makan dan minum pelayanan tamu kantor Camat, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan</p>		Bulan	12	99,65%	
		Bulan	12	99.99%	
		Bulan	12	84.19%	
		Bulan	12	99.94%	
		Bulan	12	100%	
		Bulan	12	99.74%	
		Bulan	12	99.97%	

	konsultasi SKPD,					
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,		-	-	-	
	Terlaksannnya Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan,		-	-	-	
2	jumlah Peralatan gedung kantor di beli		-	-	-	Terpenuhinya Prog.
	Terpeliharanya Rumah Dinas	Unit	1	99.91%		Peningkatan Sarana Dan Prasarana
	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	1	99.91%		Aparatur
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal	Unit	3	99.56%		
	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	100%		
3	Persentase fasilitasi dan pembinaan yang menerapkan Lingkungan Sehat	Nagari	10	0%		Terlaksananya Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat

4	Persentase permasalahan trantibun yang ditindaklanjuti		Nagari	10	0 %	Terlaksananya Prog. Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
5	Persentase fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Nagari (PKK Nagari)		Nagari	10	99.97%	Terlaksananya program fasilitasi dan pembinaan lembag social dan ekonomi Masyarakat
6	Persentase fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Nagari (Liga/Turnament)		Kali	0	0 %	Terlaksananya program fasilitasi dan pembinaan lembag social dan ekonomi Masyarakat
7	Persentase usulan program/kegiatan musrenbang nagari yang diverivikasi sesuai dengan program proitas		Usulan	13	100%	Terlaksananya Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah

8	Persentase fasilitasi, dan monev pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa/nagari		Nagari	10	99.74%	Terlaksananya Prog. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
9	Persentase koordinasi dan pembinaan kewilayahan		Nagari	10	100%	Program Pemantapan otonomi daerah
10	Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI, Peringkat MTQ Pesisir Selatan, Persentase Lembaga Didikan Subuh Yang Dikunjungi dan Persentase kunjungan tim silaturahmi Pemda		Persen	100	0%	Terlaksananya Prog.Peningkatan Imtaq
11	Persentase pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kali	1	100%	Terlaksannanya program pengembangan wawasan kebangsaan

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;**
- 3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;**
- 5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2022;**
- 6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan**
- 7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.**

2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kantor Camat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perm asalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Kewilayahannya	Kec. Airpura	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Airpura	Bulan	12	98,93	1.149.421.493	1.044.622.525			
	1.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Bulan	12	99.88	1.215.961.786	1.044.622.525			
	1.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	Bulan	12	100	49.413.629	49.211.721			

2					Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Airpura	Bula n	12	100	156.916.904	156.865. 117			
	2. 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Ketersediaannya bahan komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Bula n	12	99.95	4.481.840	4.479.00 0			
	2. 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor	Bula n	12	100					
	2. 3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	Bula n	12	100	26.222.444	26.219.0 00			
	2. 4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bula n	12	100	5.723.120	5.723.00 0			
	2. 5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bula n	12	100	1.800.000	1.800.00 0			

	2. 6				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan minum tamu	Bula n	12	100	5.857.500	5.842.50 0			
	2. 7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi SKPD	Bula n	12	99.98	112.832.000	112.801. 617			
3		Kewilayaha n	Kec. Airpura		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk penunjang pelayanan urusan administrasi kantor	Bula n	12	99.73	42.167.000	42.050.6 38			
	3. 1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan listrik dan air	Bula n	12	100	6.167.000	6.050.63 8			

4		Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	Bulan	12	99.98	104.518.176	104.300.300			
	4.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kinerja dilapangan	Bulan	12	99.35	52.228.556	52.049.300			
	4.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	100	4.850.000	10.350.000			
	4.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	Bulan	12	100	41.939.620	41.901.000			

5		Kesehatan	Kec. Airpura		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	Jumlah sosialisasi dan penanganan covid 19	Perse n	100	100	58.416.920	58.110.5 00			
	5. 1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam penaggunlangan Pandemi	Nagar i	10	100	58.416.920	58.110.5 00			
	5. 1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam penaggunlangan Pandemi	Nagar i	10	100	44.820.000	44.796.5 00			
6		Perencanaa n	Kec. Airpura		Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Mewujudkan pembinaan masyarakat nagari	Naga ri	10	100	40.646.000	40.575.0 00			
	6. 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Mewujudkan pembangunan yang berkesenambun gan	Usula n	21	100	11.100.000	11.100.0 00			

					Desa									
	6. 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan membangun semangat olahraga	Nagari	10	100	30.546.000	30.475.000			
7		Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitas dan pembinaan kewilayahan	Perse	100	100	30.185.000	30.134.000			
	7. 1				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	Nagari	10	100	19.535.000	19.484.000			
	7. 2				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah ormas dan kelompok masyarakat dilakukan pembinaan dan difasilitasi	Nagari	10	100	10.650.000	10.650.000			

Keterangan:

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2022. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2022;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2022;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;

- 14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019; dan**
- 15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Airpura yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 1.668.857.013,- (Satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah). Kemudian terjadi pengalihan dalam rangka penanganan COVID-19 dipergeseran anggaran dikurangi menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan terjadi perubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) anggaran berubah menjadi Rp. 1.627.467.660,- (Satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 1.453.726.804,- 89.32%, sisa anggaran Rp. 173.740.856,- (10.68%),-. Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. 1.215.961.786,- terdiri dari Belanja Pegawai mencakup gaji dan beberapa tunjangan ASN sebesar Rp. 1.215.961.786,- dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 438.843.252,- yang mana realisasi belanja tidak langsung sampai 31 Desember 2022 mencapai Rp. 1.044.622.525,- (85.91%), (SPj Fungsional per 31 Desember 2022 terlampir).

5.2 BELANJA LANGSUNG

Pagu awal tersedia pada Belanja langsung ini sebesar Rp. 1.393.859.115,- (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah). Selanjutnya adanya mutasi pegawai dilingkup Kabupaten Pesisir Selatan dan adanya anggaran penanganan COVID-19 sehingga diperubahan anggaran menjadi Rp. 1.591.396.493,- (Satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dengan realisasi Rp. 1.542.490.805,- 96,93%, sisa anggaran Rp. 48.905.688,- (3.07%) tidak bisa dibelanjakan, terdiri dari beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.149.421.493,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.044.622.525,- (85.91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 171.339.261,- (14.09%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.149.421.493,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.101.353.750,- (95.82%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.067.743,- (4.18%), adapun anggaran yang tidak terealisasi disebabkan adanya mutasi jabatan berdasarkan pangkat dan golongan.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.215.961.786,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.044.622.525,- (85.91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 171.339.261,- (14.09%)

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.413.629,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 49.211.721,- (99.59%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 201.908,- (0.41%)

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan menunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 156.916.904,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 156.865.117,- (99.97%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 51.787,- (0.03%) dengan kegiatan sebagai berikut :

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.481.840,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.479.000,- (99.94%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.840,- (0.06%).

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdiri dari Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. . 0,- (0%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dan benda-benda pos lainnya dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 26.222.444 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.219.000,- (99.99%) dan sisa anggaran Rp. 3.444,- (0.01%).

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.723.120,- dan realisasi sebesar Rp. 5.723.000,- (99.99%) dan sisa anggaran Rp. 120,- (0.01%).

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.800.000 terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (100%) dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%).

h. Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. . 5.857.500,-,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.842.500,- (99.74%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 15.000,- (0.26%).

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.832.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 112.801.617,- (99.97%), dan sisa belanja Rp. 30.383,- (0.03%).

1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi peralatan dan bahan penerangan gedung kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 42.167.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 42.050.638,- (99.72%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 116.362,- (0.28%) dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan menunjang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.167.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.050.638,- (98.11%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 116.362,- (1.89%).

ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merupakan kegiatan menunjang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 36.000.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%)

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 104.518.176,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 104.300.300,- (99.97%), dan sisa anggaran Rp. 217.876,- (0.03%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merupakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 52.228.556,- dengan realisasi keuangan Rp. 52.049.300,- (99.66%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 179.256,- (0.34%).

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Merupakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk memenuhi peralatan pelayanan administrasi kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.350.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0%).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan kegiatan untuk memelihara kebutuhan secara berkala pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.939.620,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 41.901.000,- (99.91%) dan sisa belanja sebesar Rp. 38.620,- (0.09%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Merupakan program untuk pemenuhan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dapat maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 58.416.920,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 58.110.500,- (99,48%), dan sisa anggaran Rp. 306.420,- (0.52%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Merupakan kegiatan untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat memenuhi pelayanan publik, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan berupa belanja barang dan jasa, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 58.416.920,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 58.110.500,- (99,48%), dan sisa anggaran Rp. 306.420,- (0.52%).

2. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Merupakan program bertujuan untuk program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 40.646.000. terealisasi keuangan sebesar Rp. 40.575.000 (99.83%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 71.000,- (0.17%).

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Merupakan kegiatan untuk perencanaan dan meningkatkan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan Airpura merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11.100.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 11.100.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial masyarakat salah satunya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 30.546.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.475.000,- (99.77%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 71.000,- (0.23%).

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah

Merupakan program untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan diwilayah Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.185.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 30.134.000,- (99.83%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 51.000,- (0.27%), dengan kegiatan :

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun RI (HUT RI) ke-76 tahun 2022, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 19.535.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 19.484.000,- (99.74%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 51.000,- (0.26%)

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Merupakan program untuk melaksanakan koordinasi antar pimpinan instansi atau Muspika diwilayah Kecamatan untuk pembinaan kewilayahan untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.650.000, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.650.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan program untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah dalam rangka pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Nagari diwilayah Kecamatan Airpura, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 9.101.500,- (99.74%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 23.500,- (0.26%), dengan kegiatan :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan program yang bertujuan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah dalam rangka pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Nagari diwilayah Kecamatan Airpura, dimana sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 9.101.500,- (99.74%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 23.500,- (0.26%)

Selanjutnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ini dimana anggaran yang dialokasikan lebih banyak dialihkan untuk Penanganan COVID-19 sehingga Program dan Kegiatan tertunda atau ditiadakan, dan akan lebih terinci dan tertera di lampiran CALK, seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung terlihat dalam SPj Fungsional dan dalam Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2022 dengan keadaan per 31 Desember 2022.

2.3 Kebijakan Strategis

Kebijakan Kecamatan Airpura

No.	Kebijakan Strategis	Dasar hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2022	Landasan dan arah prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkenambungan.
2	Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2022	Landasan dan arah prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkenambungan.

2.4 Penghargaan

Kecamatan Airpura dalam periode tiga tahun berturut-turut (2021 dan 2022) mendapat Penghargaan PPID paling Informatif,

No.	Penghargaan				
	Nama	Pemberi	Pd/Badan Penerima	Tempat dan Tanggal	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1.	Terbaik I Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, 20 November 2021	 
2.	Terbaik I Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi Informatif Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Airpura	Painan, Desember 2022	 

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Pada tahun Anggaran 2022 kemarin banyak kendala dalam penganggaran maupun realisasi anggaran. Hal ini terjadi dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menghebohkan bukan saja kita tapi seluruh dunia terdampak di dalamnya. Banyak kegiatan yang telah terencana dan dianggarkan dalam DPA tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya aturan-aturan baru terkait Covid-19 ini.

Kondisi ini menyebabkan adanya kebijakan Kabupaten untuk memangkas Anggaran Operasional yang jumlahnya mencapai Ratusan Juta Rupiah. Pemangkasan yang dilakukan Pemda yang dilakukan secara mendadak dengan tanpa koordinasi dengan instansi terkait yang anggarannya dipangkas tentu saja mempengaruhi kinerja Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan.

2. Solusi

Dari permasalahan yang ada, perlu kiranya untuk Pemda khususnya BPKD dan Bapeda untuk melakukan rapat dengan SKPD terlebih dahulu sebelum melakukan pemangkasan Anggaran, ini perlu dilakukan agar tidak terjadi salah pangkas yang berdampak terhadap menurunnya kinerja perangkat daerah yang akhirnya berpengaruh negatif terhadap pencapaian target kinerja SKPD bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Airpura Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang kami laksanakan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berjalan cukup optimal meskipun masih terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas kami di kecamatan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri, keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen yang ada. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kecamatan Airpura yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini dapat kami jadikan dijadikan tolak ukur guna peningkatan kinerja kami kedepannya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Airpura Akhir Tahun Anggaran 2022, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA
LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

10. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AIRPURA

Kecamatan Airpura dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Airpura	Bulan	12	98,93	1.591.396.493	1.542.490.805
	1.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Bulan	12	85.91	1.215.961.786	1.044.622.525
	1.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	Bulan	12	99.85	49.413.629	49.211.721
2				Program	Meningkatkan	Bulan	12	99.97	156.916.904	156.865.117



					Administrasi Umum Perangkat Daerah	kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Airpura					
	2.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaannya bahan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	99.94	4.481.840	4.479.000
	2.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor	Bulan	12	0	0	0
	2.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	Bulan	12	99.99	26.222.444	26.219.000
	2.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	99.99	5.723.120	5.723.000
	2.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	100	1.800.000	1.800.000



	2.6				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan minum tamu	Bulan	12	99.74	5.857.500	5.842.500
	2.7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	99.97	112.832.000	112.801.617
3		Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk penunjang pelayanan urusan administrasi kantor	Bulan	12	99.72	42.167.000	42.050.638
	3.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan listrik dan air	Bulan	12	98.11	6.167.000	6.050.638
					Penyedia jasa pelayanan umum kantor				100	36.000.000	36.000.000



4		Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	Bulan	12	99.97	104.518.176	104.300.300
	4.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kinerja dilapangan	Bulan	12	99.66	52.228.556	52.049.300
	4.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Bulan	12	100	4.850.000	10.350.000
	4.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	Bulan	12	99.91	41.939.620	41.901.000



5		Kesehatan	Kec. Airpura		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah sosialisasi dan penanganan covid 19	Persen	100	99,48	58.416.920	58.110.500
	5.1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam penanggulangan Pandemi	Nagari	10	99,48	58.416.920	58.110.500
	5.1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah nagari dan sekolah yang difasilitasi dalam penanggulangan Pandemi	Nagari	10	100	44.820.000	44.796.500
6		Perencanaan	Kec. Airpura		Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Mewujudkan pembinaan masyarakat nagari	Nagari	10	99.83	40.646.000	40.575.000



	6.1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Mewujudkan pembangunan yang berkesenambungan	Usulan	21	100	11.100.000	11.100.000
	6.2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan membangun semangat olahraga	Nagari	10	99.77	30.546.000	30.475.000
7		Kewilayahan	Kec. Airpura		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi dan pembinaan pembangunan kewilayahan	Persen	100	99.83	30.185.000	30.134.000
	7.1				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	Nagari	10	99.74	19.535.000	19.484.000



	7.2				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah ormas dan kelompok masyarakat dilakukan pembinaan dan difasilitasi	Nagari	10	100	10.650.000	10.650.000
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				99.74	9.125.000	9.101.500
					Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				99.74	9.125.000	9.101.500



- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan PATEN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan	100	100	100
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai LAKIP Kantor Camat	BB	BB+	90
3	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10 Nagari	10 Nagari	90



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. **Meningkatnya Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya ketersediaan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (bln).
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln)
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output terkelolanya Ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln).
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan alat tulis (bln)
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln)
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (bln)
- (7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln).
- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln)



- (9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (bln)
- (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln)
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang tersedia.
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari dengan output Persentase tata kelola keuangan dan Pemerintahan nagari yang baik, Jumlah nagari yang dibina dan dfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

